

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/190/KEP/413.013/2020

TENTANG

TIM TEKNIS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KEGIATAN PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memantapkan ketahanan pangan yang berkelanjutan diperlukan mekanisme koordinasi yang mampu mengintegrasikan berbagai bentuk kebijakan terkait dengan sistem ketahanan pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lamongan, perlu membentuk Tim Teknis Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten Pembentukan Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara 1950 Indonesia Tahun Nomor Republik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007

Nomor 10/E);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

Tim Teknis Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan survey lokasi calon penerima bantuan dari Cadangan Pangan Pemerintah;
- b. melakukan identifikasi dan verifikasi sasaran calon Pangan dari Cadangan bantuan penerima Pemerintah;
- c. menyalurkan bantuan ke lokasi penerima; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 28 April 2020

> BUPATI LAMONGAN, ttd. **FADELI**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

- 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
- 4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
- Pangan Ketahanan Dinas 5. Sdr. Kepala Kabupaten Lamongan;
- 6. Sdr. Tim Teknis dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

> JOKO NURSIYANTO NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR: 188/190/KEP/413.013/2020

TANGGAL: 28 APRIL 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Jabatan dalam Keanggotaan	Keterangan
1	2	3
Ī.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan
II.	Ketua	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan
III.	Sekretaris	Kepala Seksi Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan
IV.	Anggota	a. Kepala Seksi Pegembangan Usaha dan Kemitraan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan b. Kepala Seksi Produksi dan Usaha Budidaya pada Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan c. Kepala Seksi Hortikultura, Aneka Kacang-Kacangan, dan Umbi-Umbian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lamongan d. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan e. Kepala Seksi Tanggap Darurat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan f. Kusnan Arif, S.E., Staf pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan g. Abdul Wakhid, S.E., Staf pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

> JOKO NURSIYANTO NIP. 19680114 198801 1 001